

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ABDUL HAKIM ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 23 .Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana setrata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Sekretaris,

Arif Wijaya, SH. M.Hum
NIP. 1971071920050110

Penguji I,

Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.
TP. 195511181981031003

Penguji II

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Rembimbing,

Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Surabaya, 23 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEPSI AHL AL-HALL WA AL-'AQD DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH	20
A. Pengertian Ahl al-Hall wa al-'Aqd	20
B. Tugas dan kewenangan Ahl al-Hall wa al-'Aqd	22
C. Prakteknya dalam Sejarah Pemerintahan Islam	36

Madinah sebagai Negara pada waktu itu baik pada kepemimpinan nabi Muhammad dan khulafa ar rasyidin terdapat pembagian kekuasaan dan pembagian peran, sehingga fungsi-fungsi kepemimpinan tidak hanya dijalankan oleh khalifah saja. Seperti adanya sekretaris Negara, gubernur dan lain sebagainya. Kepemimpinan pada masa-masa itu bisa dikatakan sebagai kepemimpinan yang demokratis, karena keputusan-keputusan yang diambil baik oleh nabi Muhammad dan khalifah setelahnya melalui forum musyawarah atau sharing dengan orang-orang yang disekitarnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi-solusi terhadap problem kenegaraan.

[illegible]

Pegantian antar waktu (PAW) yang terjadi terhadap anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto disebabkan oleh, perpindahan partai politik. Dari partai kebangkiatn bangsa (PKB) ke partai kebangkitan nasional ulama (PKNU). Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu tersebut, dulunya dalam pemilihan umum tahun 2004 merupakan anggota partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilihnya sebagai anggota DPRD berangkatnya melalui partai tersebut. Menjelang pemilihan umum 2009 partai Kebangkitan Bangsa pecah menjadi 2 (dua) kubu yakni kubu muhaimin iskandar dan kubu KH Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Selain itu juga muncul partai Kebangkitan Nahdatul Ulama yang mengatasnamakan partainya orang-orang NU, NU yang nota bane adalah ormas terbesar di Indonesia dan massanya menjadi rebutan partai tersebut. Alasan-

⁴ *Ibid.*, pasal 55 ayat 2

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- [illegible]

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi semua data yang terkait.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto yang berjumlah (25) dua puluh lima anggota DPRD. sedangkan sampelnya adalah anggota DPRD yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang berjumlah (6).enam Dan jumlah orang yang akan diwawancarai dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pergantian antar waktu anggota DPRD FKB Kota Mojokerto sejumlah 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- [illegible]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Mojokerto Fraksi
Kebangkitan Bangsa. Jl. Brawijaya No.108 Kota Mojokerto.

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah fungsionaris partai Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa yang terkena sanksi pergantian antar waktu, sekaligus orang-orang atau lembaga yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk pergantian antar waktu anggota DPRD tersebut yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

4. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dokumen surat keputusan dan surat permohonan dalam proses pergantian antar waktu tersebut sekaligus melakukan wawancara dilapangan.dalam penelitian yang dipergunakan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data dari buku, jurnal, artikel dan referensi lainnya, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data dari pelaku politik yang terlibat dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, serta pandangan fikih siyasah terhadap pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*⁹

7. Prinsip *at-Tasamuh*

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan bernegara dan berbangsa, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku dan bahasa. Kemajemukan atau pluralitas merupakan sunnah Allah. Sehingga setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain.¹⁰

Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. *al-Kāfirūn* (109): 6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: *Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.*¹¹

⁹ *Ibid.*, 271

¹⁰ A. Maftuh Abegibriel, A. Yani Abeveiro, SR-ins team, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*, h. 2-11

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1112

- b. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD yang diajukan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA APBD
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD propinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- i. Membentuk pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- k. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

Berdasarkan AD/ART tersebut, bahwa anggota yang berpindah partai akan diberikan sanksi yakni sanksi pemecatan atau pemberhentian sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa.

Perpindahan partai politik ini terjadi karena anggota tersebut khawatir tidak bisa mencalonkan lagi sebagai calon anggota DPRD Kota Mojokerto untuk tahun 2009, disebabkan anggota yang melakukan perpindahan partai politik tersebut sudah menjadi anggota DPRD Kota Mojokerto selama dua periode melalui kendaraan Partai Kebangkitan Bangsa.⁷

Sedangkan alasan dari anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi korban Pergantian Antar Waktu tersebut adalah karena di internal Partai Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto sering kali terjadi konflik kepentingan dan menganggap Partai Kebangkitan Bangsa tidak demokratis yang disebabkan pucuk pimpinan partai selalu dipegang oleh keluarga *kiai* atau *ulama'* padahal kualitas kepemimpinan adalah kurang memenuhi persyaratan sebagai pimpinan.⁸

Dengan alasan-alasan tersebut DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto mengambil keputusan di internal partai untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota-anggotanya yang duduk di jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto setelah mereka dengan bukti kongkrit dinyatakan berpindah partai politik.

⁷ Wawancara dengan Abdullah fanani, tanggal 8 januari 2010

⁸ Wawancara dengan Noer Kholis, tanggal 8 Januari 2010

C. Mekanisme dan Prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 55 ayat 3 pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD propinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya.⁹

Berdasarkan undang-undang tersebut, setelah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk di jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto terbukti berpindah partai politik dengan bukti SK dan terdaftar sebagai di KPUD Kota Mojokerto sebagai calon anggota legislatif dari partai lain. Di internal Partai Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto terjadi gonjang-ganjing mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW), dan pengurus DPC PKB segera mengambil langkah politik dengan cara melakukan konsolidasi internal partai dan membentuk tim verifikasi mengenai kebenaran berpindahnya anggota-anggotanya tersebut ke partai politik yang lain.¹⁰

Mekanisme dan prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut terbilang unik. Karena disini yang di-PAW adalah

⁹ Undang-undang RI no. 32 tahun 2004 pasal 55 ayat 3

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Umum PKB Kota Mojokerto, Asaduddin Mudzakkir, tanggal 8 tahun 2009

1. Usulan pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah langsung disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Wali Kota/Bupati
2. Apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat 1, sekretaris DPRD yang menyampaikan usulan yang dimaksud
3. Usulan pemberhentian anggota DPRD yang didasarkan atas keputusan dewan pimpinan pusat atau dewan pimpinan wilayah/ daerah partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan tata tertib tersebut pada pasal 1 dinyatakan bahwa apabila ada usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD yang berasal dari partai politik anggota DPRD yang bersangkutan harus menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada gubernur untuk dimintakan Surat Keputusan (SK). Tetapi yang menjadi problem dalam proses Pergantian

c.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga tim pokja mengirimkan surat kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKB Jawa Timur untuk ditindaklanjuti ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang isinya meminta kepada mereka untuk memecat atau memberhentikan keanggotaan kader partai yang berpindah partai dari partai PKB ke PKNU dan PPP tersebut yang nantinya berkas-berkas surat tersebut akan dilampirkan sebagai bukti untuk mengajukan ke DPRD dan pemerintah Kota Mojokerto sekaligus sebagai bukti untuk di bawa ke kantor Gubernur Jawa Timur. Tidak lama setelah mengirimkan surat ke DPP melalui DPD, DPC PKB Mojokerto mendapatkan surat balasan dari DPP yang isinya menyetujui pemecatan keanggota kader yang berpindah partai politik tersebut.

Bukti-bukti yang sudah terkumpul, menguatkan tekad DPC PKB Kota Mojokerto untuk melakukan PAW terhadap anggotanya yang duduk dipimpinan dan anggota DPRD tersebut. Setelah itu tim pokja membentuk surat resmi yang

[illegible]

1. H.Abdullah Fanani SH.
2. H. Tatok Setyadi
3. Drs. H. Abdul Halim Hasyim
4. Achmad Rusyad Manfaluti, S.Ag.
5. Sumarliah, S.Ag

Berdasarkan kronologis tersebut akhirnya perjuangan untuk mem-PAW anggota PKB yang berpindah partai politik tersebut akhirnya berhasil

[illegible]

dilaksanakan, walaupun memakan waktu dan tenaga yang cukup panjang. Usaha DPC PKB Kota Mojokerto tersebut tidak murni kepentingan politik tetapi adalah usaha untuk menegakkan AD/ART atau peraturan partai. Apabila tidak memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi partai akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan partai. Tetapi pada pemilu 2009 Partai Kebangkitan Bangsa hanya mampu meraup atau mendapatkan kursi di DPRD Kota Mojokerto hanya 3 kursi. Ini adalah akibat konflik yang berkepanjangan di internal Partai Kebangkitan Bangsa yang mempermasalahkan legalitas kepemimpinan Muhaimin Iskandar sebagai pimpinan pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

ini, karena akhir dari proses-proses negosiasi untuk mensukseskan kandidat pimpinan dalam suatu lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari praktek-praktek *money politics*.

Alasan yang menyebabkan terjadinya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa tersebut adalah dikarenakan perpindahan partai politik dari PKB ke PKNU dan PPP. Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut disebabkan adanya kekhawatiran tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada pemilu 2009 karena mereka sudah menjadi anggota DPRD melalui kendaraan politik PKB sudah dua periode, Selain itu juga alasan mereka adalah Konflik di internal PKB yang berlarut-larut.

Perpindahan partai politik merupakan hal yang biasa terjadi di dunia politik, karena loyalitas dan komitmen kader suatu partai tidak terbentuk dan mengakar, karena sistem kaderisasi partai politik sangat lemah. Kader suatu partai akan berpindah partai apabila di partainya tidak mampu menampung aspirasi politiknya dan tidak adanya kesempatan untuk naik menjadi pimpinan partai atau tidak ada kesempatan untuk mewakili partainya duduk di parlemen.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai prosedur dan mekanisme proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut diawali dengan usulan Partai Kebangkitan Bangsa Kota

Mojokerto kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk ditembusi ke Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan legalitasnya.

Sebelum surat yang diajukan oleh pimpinan DPC PKB Kota Mojokerto melalui pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, ada proses pembahasan melalui musyawarah yang dilakukan di internal pimpinan DPRD dengan tujuan untuk menganalisis apakah Pergantian antar waktu yang diusulkan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang apa belum. Setelah proses pembahasan melalui musyawarah oleh pimpinan DPRD maka surat yang diajukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut ditanda tangani oleh salah satu pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur melalui Wali Kota.

Dalam sejarah politik Islam, Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh nabi Muhammad dan khalifah-khalifah setelahnya. Lembaga yang melakukan musyawarah pada zaman itu adalah lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang memiliki tugas untuk membantu khalifah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan sekaligus sebagai tempat untuk melakukan konsultasi para khalifah untuk menentukan siapa pengganti selanjutnya.

Terkait dalam hal ini, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan kelembagaan yang dipakai dalam sejarah Islam Kekhalifahan, sedangkan untuk mengkomparasikan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dengan DPR/DPRD (Kot/Kab./Prov.)

Selain itu juga lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ada pada masa khalifah-khalifah setelah nabi Muhammad adalah lembaga pemberi legitimasi para khalifah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan. Sehingga kebijakam yang diambil bisa berjalan secara efektif.

[illegible]

Pada masa peralihan kepemimpinan umat Islam dari khalifah Usman bin Affan ke khalifah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak memecat Geburnur atau Amir yang ditunjuk oleh khalifah Usman bin Affan karena mereka adalah bagian dari keluarga Usman bin Affan dan dianggap tidak berkompeten dalam memegang jabatan tersebut sekaligus mereka juga tidak memiliki loyalitas terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib seperti sikap membangkang yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap khalifah Ali bin Abi

menciptakan kedamaian dimuka bumi ini. Politisi bangsa ini seharusnya menjadikan Islam sebagai pegangan untuk menjalankan aktifitas berpolitik, karena Islam sebagai sistem nilai seharusnya prilaku politis bangsa ini harus terikat dengan nilai-nilai tersebut. Sehingga permainan dalam dunia politik tidak hanya berorientasi pada kepentingan dunia saja. Membentuk masyarakat yang Islami dan sejahtera merupakan tujuan akhir dari semua permainan politik tersebut.

Dalam ajaran Islam berkhianat adalah prilaku yang tidak terpuji, karena mencederai kesepakatan atau perjanjian dengan sesama muslim dan sesama manusia, yang akan berakibat pada permusuhan dan saling benci membenci antara yang satu dengan yang lain. Nabi muhammad menagajarkan kepada umatnya untuk bersikap yang amanah, terpercaya dan jujur. Jabatan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan Tuhan kepada pemimpin dan Dewan Perwakilan Rakyat bangsa ini yang suatu saat akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah swt.

khalifah apabila gubernur dan *amir* tersebut dianggap tidak memiliki loyalitas dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh khalifah. Sedangkan Pemecatan terhadap anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki loyalitas

Dalam praktek politik Islam, lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan lembaga tempat untuk berkonsultasi para khalifah untuk mempersiapkan dan menetapkan putra mahkota yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan khalifah selanjutnya, serta sebagai tempat untuk melakukan konsultasi dalam perumusan kebijakan sekaligus sebagai tempat untuk melakukan konsultasi sebelum terjadinya pemecatan terhadap gubernur atau amar yang tidak memiliki loyalitas serta tidak patuh terhadap kebijakan khalifah. Selain itu juga lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan lembaga penyelenggara musyawarah yang ada pada masa nabi dan khalifah-khalifah setelahnya.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas sivitas akademika IAIN Sunan Ampel dan meningkatkan khazanah intelektualitas umat Islam diperlukan lagi pengkajian-pengkajian serta penelitian yang lebih mendalam untuk menambah referensi sivitas akademika khususnya dan umat Islam secara umum dalam bidang fikih siyasah dan sejarah politik Islam.

Selain itu juga diperlukan proses diskusi ilmiah sebagai media transpormasi khazanah keilmuan yang dimiliki umat Islam pada masa lampau

untuk dikontekstualisasikan pada era saat ini. Karena sejarah masa lalu politik umat Islam harus menjadi pegangan untuk menatap masa depan politik umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta Timur: Kencana Prenada Media, 2003
- A. Maftuh Abegibriel, dkk., *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004
- Abd. Muin Salim, *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Gramedia Media Sarana Indonesia, 1999
- Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Pustaka LPES, 1985
- Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Asy'ary, dkk. *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2002
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 1980
- Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Al-Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Imam Hidayat, Achmadur Rifa'i dan Santoso, *Mengenal Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DPRD*
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Kholik, Fasid Abdullah, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005
- M.Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993

Soelaiman Fadeli, Muhamad Subhan, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah*,
Surabaya: Khalista, 2007

Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telah Konseptual dan Histories*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Zaidan, Abdul Karim, *Pemilu dan Parpol dalam Perpektif Islam*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003

Depaertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1995

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang pemilu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan DPD

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Keputusan DPRD Kota Mojokerto No 09 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Mojokerto.

LPP DPC PKB Kota Mojokerto, *Orientasi Politik PKB.*